



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGGUNAAN

*GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
OF JAWA BARAT BY EXPENDITURE*

2009-2011



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGGUNAAN**

*Gross Regional Domestic Product of Jawa Barat
by Expenditure*

2009 - 2011

<http://jabar.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Menurut Penggunaan
2009 – 2011**

ISSN : 0854.9303
Nomor Publikasi : 32550.1202
Katalog BPS : 9302004.32
Ukuran Buku : 6.6 inchi x 10 inchi
Jumlah Halaman : 59 + vii halaman

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
BPS Provinsi Jawa Barat

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan pengembangan statistik regional, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya menyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha dan Penggunaan. PDRB menurut penggunaan merupakan salah satu penyajian perekonomian daerah yang dilihat dari sisi permintaan (demand side). PDRB menurut penggunaan terdiri atas komponen Pengeluaran Konsumsi (Rumahtangga, Pemerintah dan Lembaga non Profit), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inventori, dan Ekspor serta Impor. Penghitungan komponen-komponen tersebut menghasilkan beberapa indikator ekonomi yang menjadi tolok ukur kinerja perekonomian makro di Jawa Barat, diantaranya struktur perekonomian Jawa Barat, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat, banyaknya investasi yang terbentuk dalam hal ini modal tetap yang ditunjukkan oleh komponen PMTB, serta kinerja ekspor dan impor. Publikasi ini menyajikan data series tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sehingga ada keterbandingan setiap tahunnya untuk evaluasi kinerja perekonomian Jawa Barat. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perencana dan pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Atas bantuan dari berbagai pihak sehingga tersusunnya publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, April 2012

**Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat**

Kepala,



Drs. H. Lukman Ismail, MA.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7
2.1.1. Konsep dan Definisi	7
2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	7
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	12
2.2.1. Konsep dan Definisi	12
2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	13
2.3.1. Konsep dan Definisi.....	13
2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	13
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	14
2.4.1. Konsep dan Definisi.....	14
2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	15
2.5. Perubahan Inventori.....	15
2.6. Ekspor dan Impor.....	16
2.6.1. Konsep dan Definisi.....	16
2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	17

BAB III.	TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN	18
3.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	22
3.2.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit.....	30
3.3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	31
3.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	33
3.5.	Inventori.....	38
3.6.	Ekspor dan Impor.....	39
3.7.	Sumber Laju Pertumbuhan (<i>Source of Growth/SOG</i>)	45
3.8.	Kesimpulan	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Jawa Barat menurut Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011 (jutaan rupiah)	19
Tabel 2.	PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB terhadap Total PDRB dan <i>Source of Growth</i> PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011.....	35
Tabel 3.	Laju dan Peranan Inventori Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2009-2011..	39
Tabel 4.	Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2009-2011.....	40
Tabel 5.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011.....	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku di Jawa Barat Tahun 2009-2011.....	21
Grafik 2.	MPC (<i>Marginal Propensity to Consume</i>), PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011 Provinsi Jawa Barat (Triliun Rp).....	23
Grafik 3.	Peranan Konsumsi Makanan dan Minuman Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011 (Persen).....	24
Grafik 4.	Nilai Konsumsi Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011 (Rp Triliun).....	25
Grafik 5.	KRT perkapita dan LPE perkapita serta Laju Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011.....	26
Grafik 6.	KRT perkapita atas dasar harga Konstan (Rp Juta) dan Laju Pertumbuhannya (Persen) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.....	27
Grafik 7.	Proporsi Pinjaman Yang diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2011 di Provinsi Jawa Barat (Persen)	28
Grafik 8.	Proporsi Impor Komoditas Utama Menurut Klasifikasi BEC Tahun 2009-2011 di Provinsi Jawa Barat.....	29
Grafik 9.	Nilai Konsumsi LNPRT dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2009-2011.....	31
Grafik 10.	Nilai Konsumsi Pemerintah dan Laju Pertumbuhan Tahun 2009-2011 di Provinsi Jawa Barat	32
Grafik 11.	Peranan Konsumsi Pemerintah Tahun 2009-2011 di Provinsi Jawa Barat....	32
Grafik 12.	PMTB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2009-2011.....	34
Grafik 13.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011 (Persen).....	36
Grafik 14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011.....	37

Grafik 15.	Persentase Nilai Investasi PMA di Jawa Barat Menurut Negara Asal Tahun 2011.....	37
Grafik 16.	Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Impor Jawa Barat Tahun 2009-2011 (Persen).....	41
Grafik 17.	Kontribusi Tiga Negara Tujuan Ekspor Utama Jawa Barat Tahun 2009-2011.....	42
Grafik 18.	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Jawa Barat pada Tiga Besar Negara Tujuan Tahun 2009-2011.....	43
Grafik 19.	Peranan Empat Komoditas Unggulan Ekspor Non Migas Jawa Barat Tahun 2009-2011 (Persen).....	44
Grafik 20.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah).....	51
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah).	52
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	53
Lampiran 4.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	54
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	55
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	56
Lampiran 7.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Tahun 2000 = 100,00) (Persen).....	57
Lampiran 8.	Inflasi Tahun 2009-2011 (Persen).....	58
Lampiran 9.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011 (jutaan rupiah).....	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan ekonomi pada pokoknya adalah keterbatasan sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Gilarso, 2004). Metode yang ditempuh manusia dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa pada awalnya sangat sederhana yaitu dengan eksploitasi alam, tanpa memikirkan keberlangsungannya di masa yang akan datang. Perkembangan peradaban, jumlah penduduk dan kuantitas kebutuhan hidup mengakibatkan terjadinya proses produksi yang lebih kompleks dengan skala yang lebih besar, kebutuhan hidup tidak lagi dapat dipenuhi dengan produksi yang bersifat subsisten atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri atau komunitasnya tetapi tidak untuk kepentingan bisnis. Proses produksi merupakan rangkaian pengadaan bahan, pengolahan, distribusi hingga sampai pada konsumen.

Lebih jauh menurut Gilarso (2004) teknik produksi semakin maju didorong oleh *demand* dari Rumah Tangga Produksi (RTP) maupun Rumah Tangga Konsumsi (RTK) sehingga menyebabkan timbulnya peranan faktor produksi khususnya *capital* untuk pengadaan bangunan pabrik, mesin, peralatan serta barang untuk proses produksi atau barang modal. Barang modal ini diproduksi oleh produsen atau dalam ekonomi makro disebut dengan rumah tangga produksi (RTP) dan dibeli kembali oleh RTP guna proses produksi. Pengeluaran RTP untuk membeli barang modal disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik. Investasi (I) dapat berfungsi untuk menggantikan peralatan produksi yang aus atau penyusutan serta untuk menggerakkan perekonomian riil.

Seperti telah disinggung bahwa hasil produksi berupa barang dan jasa selain dikonsumsi RTP juga dikonsumsi oleh RTK sebagai konsumsi akhir (*final demand*). Secara makro, *demand* barang/jasa merupakan gambaran dari berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan input pada proses produksi barang/jasa lainnya, kebutuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi serta kebutuhan yang berasal dari wilayah lainnya (ekspor). Dalam pendekatan kewilayahan maka *demand*

Pemenuhan permintaan barang/jasa tidak selalu dapat disuplai dari produk domestik, namun produk dari luar wilayah juga turut memberikan kontribusi. Dengan demikian, struktur (*demand*) dapat merefleksikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Tentunya, untuk efektifitas jalannya pembangunan, perlakuan/intervensi yang dilakukan akan sangat berbeda untuk wilayah dengan sumber pertumbuhan berbeda. Dengan kata lain, akan jauh lebih efektif kebijakan peningkatan produksi (*supply push*) yang dilakukan melalui strategi tarikan permintaan (*demand pull*). Kebijakan yang hanya memprioritaskan peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan sisi permintaan akan menyebabkan penurunan tingkat harga, khususnya di tingkat produsen sehingga berdampak pada kelesuan dan akhirnya bermuara pada melemahnya kembali kinerja yang telah dibangun.

Dari uraian di atas, maka untuk mencapai efektifitas program-program dalam menstimulus LPE, tentunya tidak hanya dibutuhkan data tentang struktur produksi barang/jasa per sektor ekonomi (digambarkan oleh data PDRB menurut lapangan usaha), namun juga informasi tentang struktur penggunaan barang/jasa yang merefleksikan struktur permintaan di suatu wilayah (digambarkan oleh data PDRB menurut penggunaan).

Pendekatan yang akan disajikan dalam publikasi ini adalah penghitungan PDRB menurut penggunaan. Data agregat yang dapat diukur dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan adalah konsumsi akhir, pembentukan modal, perubahan inventori dan net ekspor. Konsumsi akhir menggambarkan pendapatan masyarakat/institusi yang dibelanjakan untuk mengkonsumsi produk domestik yang dihasilkan, pembentukan modal merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan, perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna pertambahan atau pengurangan, selanjutnya *net ekspor* adalah selisih antara angka ekspor dengan impor, baik antar negara maupun antar provinsi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penghitungan PDRB digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah serta menggunakan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi mengukur tingkat produktivitas suatu wilayah, (2) pendekatan penggunaan mengukur bagian produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor (3) pendekatan pendapatan mengukur balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Data PDRB ini dapat digunakan untuk mengamati indikator-indikator ekonomi makro untuk menganalisis perekonomian dalam menentukan arah kebijakan serta mengevaluasi hasil pembangunan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya. Di sisi lain, indikator ekonomi memerlukan analisis dari sisi permintaan (*demand*). Data yang

diperlukan untuk mendapatkan gambaran indikator ekonomi dari sisi *demand* tersebut adalah PDRB yang dihitung menurut penggunaan.

Penulisan publikasi ini dimaksudkan dan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan data indikator makro ekonomi dari sisi permintaan. Ketersediaan data tersebut adalah usaha untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat membutuhkan gambaran tentang ukuran kinerja pembangunan dan penetapan strategi-strategi yang akan dilakukan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Data PDRB Penggunaan Jawa Barat merupakan potret kinerja pembangunan ekonomi makro Jawa Barat yang dilihat dari sisi permintaan yang terdiri dari komponen Konsumsi, Investasi dan Ekspor-Impor. Selain itu, PDRB menurut penggunaan juga dapat digunakan untuk melihat sumber-sumber pertumbuhan di wilayah Jawa Barat yang diharapkan menjadi pijakan kuat untuk alat perencanaan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna data pada umumnya.

BAB II METODOLOGI

PDRB menurut penggunaan (*expenditure*) merupakan gambaran penggunaan barang/jasa yang diproduksi oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Struktur penggunaan produk barang dan jasa secara makro merupakan refleksi dari permintaan (*demand*) suatu wilayah terhadap produk barang/jasa. Secara umum, permintaan barang/jasa terbagi dalam dua bagian besar yaitu Permintaan Antara (*Intermediate Output*) dan Permintaan Akhir (*Final Demand*). Permintaan antara adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan/proses produksi pada unit usaha lainnya. Sedangkan permintaan akhir adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir untuk rumah tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (LNPR) dan pemerintah; kebutuhan investasi untuk unit usaha; dan kebutuhan luar wilayah (ekspor) .

Berdasarkan teori keseimbangan, dengan adanya produksi (*supply*) dan permintaan (*demand*), maka terjadi proses transaksi ekonomi. Dari sisi produsen transaksi tersebut menciptakan pendapatan, sedangkan dari sisi konsumen menimbulkan pengeluaran. Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut :

PDRB SAMA DENGAN NILAI SELURUH PENGELUARAN AKHIR DIKURANGI DENGAN NILAI TOTAL IMPOR
--

Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang/jasa (untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan LNPR, konsumsi pemerintah, barang modal,

perubahan persediaan, seluruh barang/jasa yang diekspor) yang disuplai dalam suatu perekonomian. Nilai pengeluaran akhir tersebut akan melebihi output yang diproduksi unit kegiatan ekonomi domestik dengan nilai sebesar nilai total impor barang dan jasa. Sehingga nilai produksi domestik akan diperoleh dari selisih pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis :

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M \quad \text{..... (1)}$$

dimana :

C_h : Konsumsi Rumah Tangga (*Household*)

C_n : Konsumsi Lembaga Non Profit (*Non Profit Institution*)

C_g : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan (*Government*)

I_i : Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Investment*)

I_s : Perubahan Inventori (*Capital Stock*)

X : Ekspor

M : Impor

Y : PDRB.

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = C + I + X - M \quad \text{..... (2)}$$

di mana :

C : Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), Pemerintah dan Pertahanan

I : Investasi

X : Ekspor

M : Impor

2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran. Pengeluaran tersebut termasuk pembelian aktiva berwujud yang tidak dapat diproduksi kembali (kecuali tanah) seperti hasil karya seni, barang-barang koleksi dan barang antik. Termasuk juga pembelian barang tahan lama seperti meubeler, sepeda motor, mobil dan barang elektronik (komputer, TV, radio) dan imputasi sewa rumah sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barang-barang dan jasa.

Di samping itu pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga.

2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

- 2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi butir satu di atas, ditambah pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga di luar penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

Dalam kasus batas, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya sudah terhitung di rumah tangga yaitu melalui konsumsi perkapita.

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Jawa Barat. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi menggunakan rata-rata harga eceran dari Statistik Harga Konsumen Provinsi Jawa Barat. Di samping itu digunakan data lainnya seperti PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pengeluaran konsumsi kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- 1). Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-bumbuan dan konsumsi bahan makanan lainnya.
- 2). Makanan dan minuman jadi.

- 3). Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau.

Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- a). Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan.
- b). Aneka barang dan jasa.
- c). Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- d). Pajak dan asuransi.
- e). Keperluan untuk pesta dan upacara.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga keseluruhan diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk tahun-tahun yang tidak ada data Susenasnya dihitung berdasarkan elastisitas pendapatan dari Susenas yang ada.

a. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan

Perkiraan konsumsi kelompok makanan digunakan model fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola.

Fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas.

Koefisien elastisitas (b) yang telah diuji digunakan untuk memperkirakan konsumsi perkapita pada tahun yang tidak ada data Susenasnya. Konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), dan data konsumsi perkapita (Susenas) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C_{n+1} = C_n + (C_n \cdot dp \cdot b)$$

di mana :

C_{n+1} : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun ke-($n+1$)

C_n : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar ke-(n)

dp : Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke- n dengan tahun ke-($n+1$)

b : Koefisien elastisitas.

Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan. Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda *revaluasi* artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar.

b. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model regresi linier. Artinya, setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan akan pakaian, dan lain sebagainya. Model yang digunakan sebagai berikut :

$$Q_i = a + (b \cdot Y_i)$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tahun-tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara mendeflasi nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi.

Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikan total nilainya dengan IHK.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

2.2.1. Konsep dan Definisi

Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk atau dibiayai oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan jasa pelayanan yang bersifat non komersial khususnya bagi anggota masyarakat umum tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan.

Bentuk LNP yang melayani rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Kemasyarakatan,
2. Organisasi Sosial,
3. Organisasi Profesi,
4. Perkumpulan Sosial / Kebudayaan / Olah raga dan Hobi,
5. Lembaga Swadaya Masyarakat,
6. Lembaga Keagamaan,
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan / Beasiswa.

2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penyusunan perkiraan konsumsi LNPRT dilakukan dengan menggunakan metoda langsung dari hasil survei khusus yaitu diperoleh dari penjumlahan output sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan dikurangi surplus usahanya.

Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 sesuai dengan kegiatan masing-masing subsektornya, seperti penghitungan menurut lapangan usaha yaitu metode deflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, atau ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya yang tidak dapat dipisahkan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah untuk konsumsinya pada saat itu.

Output pemerintah tidak dijual sehingga nilainya diukur dengan biaya produksinya, yaitu jumlah konsumsi antara, konsumsi pegawai, konsumsi modal tetap dan pajak tak langsung. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini mencakup pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tidak dapat diperoleh secara langsung karena produksi sektor ini tidak dijual. Oleh karena itu untuk memperoleh nilainya diperkirakan dari besarnya biaya produksi yang dikeluarkan.

2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan konsumsi pemerintah menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Desa yang diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3. Laporan keuangan tersebut meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pensiun dan subsidi, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya.

Selain itu digunakan juga Neraca Produksi Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan (atas dasar harga berlaku) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan atas dasar harga berlaku diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Untuk memperkirakan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dilakukan pendekatan sebagai berikut :

- 1). *Ekstrapolasi* belanja pegawai dengan indeks jumlah pegawai.
- 2). *Deflasi* belanja barang dengan IHPB tanpa ekspor tahun yang sesuai.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

2.4.1. Konsep dan Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap dikurangi dengan penjualan dari barang-barang modal bekas ditambah penjualan barang-barang lain yang berasal dari daerah atau negara lain.

Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari :

- a). Penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih dan digunakan bukan untuk keperluan militer.
- b). Pengeluaran atas peningkatan dan perubahan barang-barang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang tersebut atau dapat meningkatkan produktivitasnya.

- c). Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan dan perluasan perkebunan, pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan.
- d). Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu dan pembibitan ternak potong.

2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha. Di samping itu, pembentukan modal dapat juga dihitung berdasarkan arus barang atau *Commodity Flow*.

Pembentukan modal tetap menurut lapangan usaha mencakup sembilan sektor, yaitu :

- 1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
- 2). Pertambangan dan Penggalian,
- 3). Industri Pengolahan,
- 4). Listrik, Gas dan Air Bersih,
- 5). Bangunan,
- 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran,
- 7). Pengangkutan dan Komunikasi,
- 8). Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
- 9). Jasa-jasa.

2.5. Perubahan Inventori

Data mengenai nilai perubahan inventori dalam komponen PDRB masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari selisih PDRB dengan komponen

permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor neto. Dengan demikian, didalamnya masih terkandung selisih statistik (*Statistical Discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

2.6. Ekspor dan Impor

2.6.1. Konsep dan Definisi

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, tetapi impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena impor bukan merupakan produksi domestik jadi harus dikurangkan dari total penggunaan dalam PDRB.

Ekspor dan impor barang dan jasa meliputi angkutan dan komunikasi, jasa asuransi serta barang dan jasa lain seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi penjualan di luar daerah dan pembayaran biaya kantor pusat perusahaan induk oleh cabang dan anak perusahaan di luar daerah.

Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Pengeluaran untuk biaya perjalanan yang dibayar oleh majikan diperlakukan sebagai ekspor dan impor barang dagangan dan bukan sebagai pembelian langsung.

Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan, barang untuk peragaan, barang contoh dan barang untuk keperluan sehari-hari wisatawan mancanegara/domestik.

Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga *f.o.b. (free on board)*, sedangkan impor barang dinilai dengan harga *c.i.f. (cost, insurance and freight)*. Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk.

Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara serta lembaga swasta non profit yang berada di daerah tersebut.

2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Data ekspor dan impor Jawa Barat masih sangat terbatas. Data yang dapat diperoleh hanya transaksi dengan luar negeri. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik Ekspor Impor terbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ekspor impor antar pulau/Provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat, Terminal Bis, Angkasa Pura melalui Dinas Bea dan Cukai.

Data lain yang diperlukan adalah IHPB untuk ekspor dan impor yang diperoleh dari Buletin Ringkas terbitan BPS dan juga data Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor dan impor yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa dengan luar negeri dan antar pulau/Provinsi merupakan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku.

Ekspor dan impor antar negara merupakan ekspor impor antar negara menurut pelabuhan di Jawa Barat, sedangkan ekspor impor antar pulau/Provinsi menggunakan ratio Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor impor atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan IHPB untuk ekspor dan impor.

BAB III

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN

Pemerintah berupaya untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga mengatasi pengangguran. Program yang diusung oleh pemerintah ini diperkenalkan oleh kepala negara RI sebagai *triple track strategy* yaitu *pro-growth*, *pro-job* dan *pro-poor*. Strategi ini juga dituangkan dalam empat pilar pembangunan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan nasional dengan penambahan *track* keempat yaitu *pro-environment*. *Track* pertama yaitu *pro-growth* adalah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan kegiatan ekspor dan investasi. *Track* kedua adalah menggerakkan sektor riil yang dapat menciptakan lapangan kerja. Sementara *track* ketiga diupayakan melalui revitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Terakhir *track* keempat yaitu *pro-environment* untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan danantisipasi dampak perubahan iklim.

Terkait dalam pencapaian strategi *pro-growth*, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dengan jalan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi spasial. Identifikasi wilayah potensial dengan sumberdaya dan karakteristik yang spesifik, baik wilayah yang telah dan belum optimal dikembangkan, mutlak diperlukan guna mengupayakan proses akselerasi tersebut.

Perekonomian Jawa Barat diupayakan dapat memicu dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Wilayah Jawa Barat memiliki potensi yang besar dengan letak geografis berbatasan langsung dengan ibukota negara sehingga diharapkan menjadi mitra pembangunan ekonomi yang mempunyai

hubungan saling menguntungkan. Lebih lanjut, Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk tertinggi menurut hasil Sensus Penduduk 2010 tercatat mencapai 43 juta jiwa lebih dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1,89 persen, dimana sebanyak 18,11 persen penduduk Indonesia berada di wilayah Jawa Barat.

Tabel 1.
PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2008-2010 (jutaan rupiah)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran KRT	427.641.859,65	465.383.669,48	510.388.750,29
a. Makanan	231.172.548,62	249.728.584,80	269.239.832,25
b. Non Makanan	196.469.311,04	215.655.084,68	241.148.918,04
2. Konsumsi LNP	5.055.740,39	3.385.128,51	3.556.229,43
3. Konsumsi Pemerintah	58.172.553,50	66.516.281,58	76.546.315,82
4. PMTB	116.396.431,43	136.629.046,85	156.341.119,23
5. Inventori	25.692.478,21	30.343.120,03	39.312.654,51
Diskrepansi	8.929.474,51	11.734.473,33	23.173.388,00
6. Ekspor	245.218.479,81	276.178.265,11	304.822.407,07
a. Antar Negara	188.561.917,50	213.667.333,71	223.435.333,59
b. Antar Provinsi	42,394,446.32	47.697.569.45	65.766.575,76
c. Jasa	14.262.115,98	14.813.361,95	15.620.497,72
7. Impor	197,265,703.16	218.576.124,42	253.134.516,53
a. Antar Negara	82.054.713,52	100.648.080,56	135.589.487,16
b. Antar Provinsi	90.411.083,50	90.642.185,57	87.917.885,80
c. Jasa	24.799.906,14	27.285.858,29	29.627.143,57
Jumlah	689.841.314,34	771.593.860,47	861.006.347,80

^{*)} Angka diperbaiki

^{**)} Angka sementara

Implikasi dari jumlah penduduk yang besar tersebut adalah upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehingga aktivitas perekonomian Jawa Barat harus

mampu menopang kebutuhan penduduknya. Apabila dikaitkan dengan strategi *pro-job* maka aktivitas perekonomian riil baik sektor primer, sekunder dan tersier harus diupayakan meningkat pertumbuhannya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bagi penciptaan lapangan kerja sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara nominal PDRB Jawa Barat pada tahun 2011 telah mencapai Rp 861.006.347,80 Juta. Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB nasional merupakan peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur yaitu mencapai 14,58 persen pada tahun 2010. Hal ini menggambarkan posisi Jawa Barat yang sangat potensial dan penting sebagai penyumbang kontribusi terhadap perekonomian nasional.

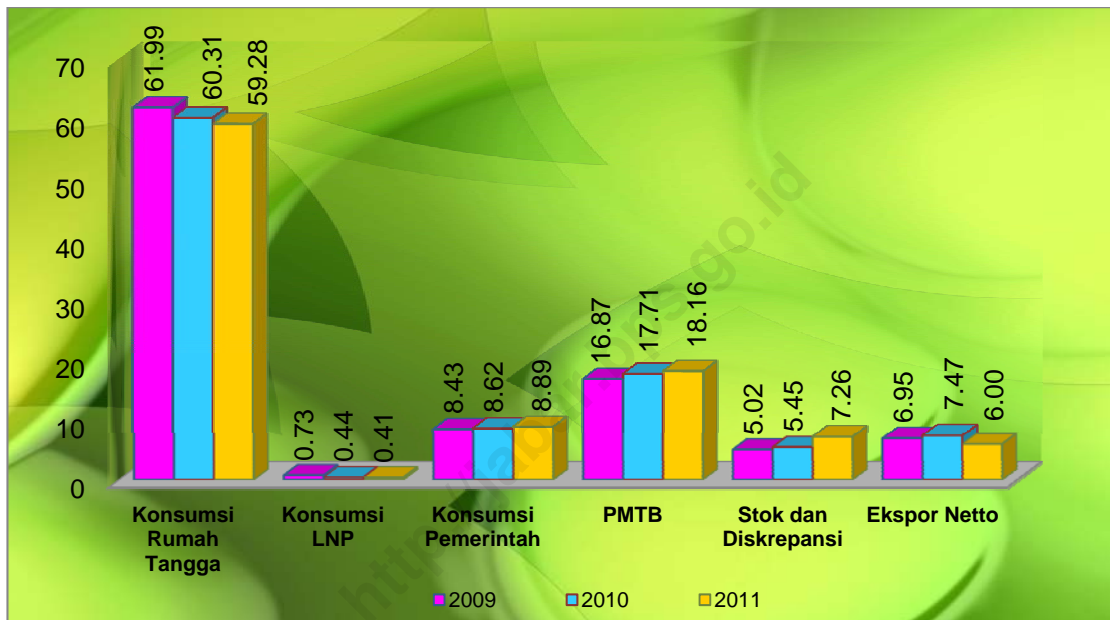
Sementara itu, perekonomian Jawa Barat ditinjau dari sisi penggunaan menggambarkan permintaan akhir dari komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, inventori dan aktivitas ekspor impor terhadap barang/jasa yang diproduksi oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.

Selama tiga tahun terakhir (2009-2011) struktur PDRB dari sisi penggunaan Jawa Barat masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata *share* sebesar 60,52 persen selama periode tersebut. Apabila dicermati selama tiga tahun *share* komponen ini memiliki *trend* yang semakin berkurang meski tipis. Hal ini menggambarkan bahwa di Jawa Barat permintaan barang/jasa mayoritas dilakukan oleh rumah tangga. Fakta ini juga menjadi gambaran pola konsumsi masyarakat Jawa Barat yang masih konsumtif.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memperlihatkan *trend* peningkatan *share* selama tiga tahun berturut-turut (2009-2011) yaitu berkisar antara

16-18 persen. Meski hanya mengalami peningkatan *share* yang tipis rata-rata satu persen per tahunnya namun fakta ini dapat memberikan sentimen positif terhadap perkembangan investasi fisik di Jawa Barat, dimana kegiatan investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong berkembangnya sektor riil yang berguna bagi peningkatan nilai tambah perekonomian wilayah.

Grafik 1. Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Barat, Tahun 2009 - 2011



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Meski komponen ekspor memiliki nilai kedua terbesar dalam PDRB sisi penggunaan, akan tetapi untuk mengukur kinerjanya harus dikurangi dengan nilai komponen impor, hasil pengurangan kedua komponen tersebut dinamakan ekspor netto. Selama kurun tiga tahun (2009-2011) *share* ekspor netto memiliki *trend* yang fluktuatif. Pengaruh krisis global tidak pelak lagi memberikan imbas negatif bagi aktivitas ekspor di Jawa Barat, hal ini terlihat dari penurunan *share* ekspor netto di Tahun 2011 menjadi sebesar 6 persen dari 7,47 persen pada tahun sebelumnya.

Penjelasan secara mendalam mengenai kontribusi, kinerja serta fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2009-2011 pada komponen-komponen pengeluaran dalam perekonomian Jawa Barat akan disajikan dalam pembahasan di bawah ini.

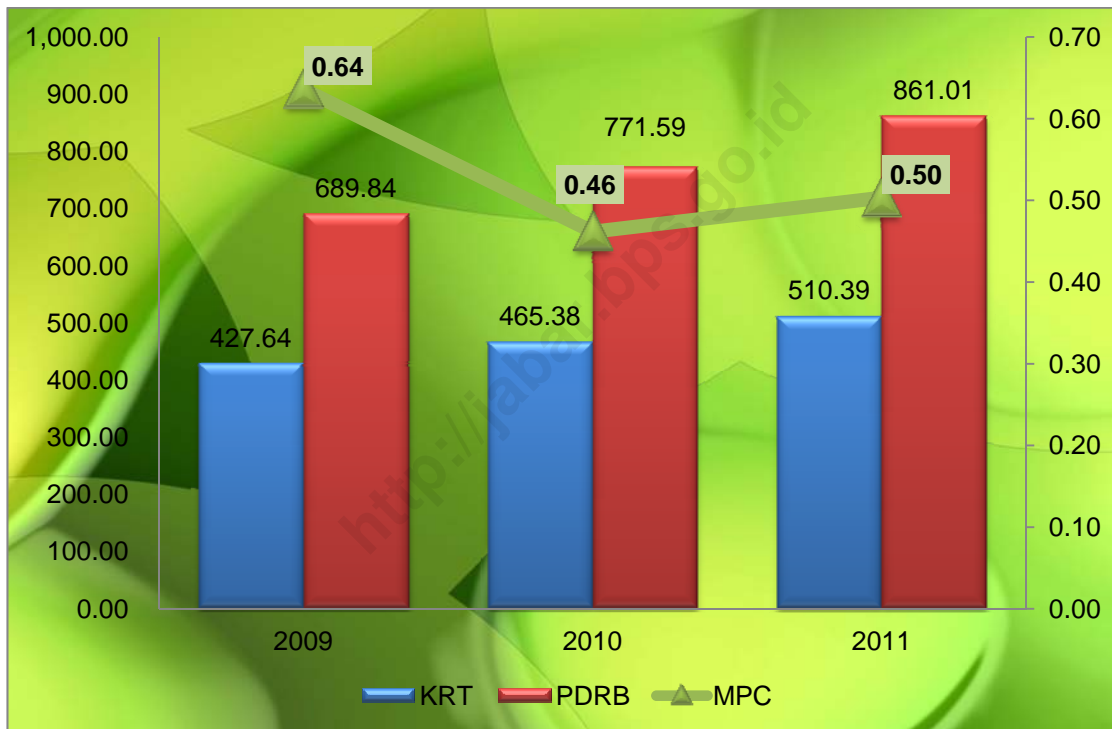
3.1. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga

Penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebanyak 43.053.732 orang, merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Hal tersebut menyebabkan pengeluaran konsumsi rumahtangga (KRT) memiliki nilai yang cukup dominan dalam perekonomian regional. Pada tahun 2011 nilainya sebesar Rp.510,39 miliar meningkat dari tahun 2010 yang sebesar Rp 465,38 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, perubahan harga (inflasi) juga perubahan pendapatan rumahtangga. Di samping ketiga faktor tersebut peningkatan KRT juga disebabkan oleh pola tradisional masyarakat yang masih konsumtif, dimana pengeluaran rumahtangga yang bersifat konsumsi masih dikedepankan dibandingkan dengan pembelian produk investasi. Juga pengaruh budaya masyarakat dalam merayakan peristiwa dalam kaitannya dengan kebudayaan atau konsumsi perayaan.

Pada grafik berikut terlihat bahwa peningkatan nilai konsumsi rumahtangga seiring dengan meningkatnya PDRB. Dengan asumsi peningkatan konsumsi dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional, dalam hal ini digunakan PDRB sebagai pendekatan pendapatan. Hubungan antara KRT dan PDRB digambarkan oleh besaran rasio MPC (*Marginal Propensity to Consume*). MPC menggambarkan pengaruh peningkatan KRT sebesar satu triliun rupiah terhadap peningkatan PDRB. Pada periode 2009-2010 rasio MPC mengalami pergerakan, pada tahun 2009 sebesar 0,64 artinya peningkatan KRT sebesar satu triliun rupiah mampu

meningkatkan PDRB sebesar 640 miliar rupiah. Besaran MPC pada tahun 2010 mengecil menjadi hanya 0,46 yaitu setiap kenaikan KRT sebesar satu triliun rupiah hanya mampu meningkatkan PDRB sebesar 460 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2011 besaran rasio MPC sedikit meningkat menjadi 0,5 artinya pada tahun 2011 peningkatan sebesar 1 triliun KRT menyebabkan meningkatnya PDRB sebesar 500 miliar rupiah.

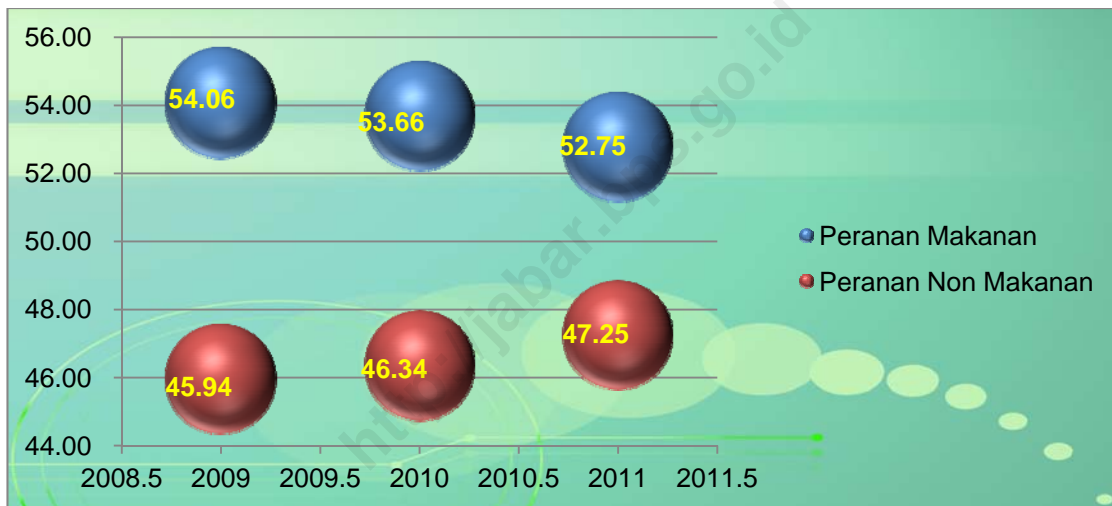
Grafik 2.
MPC (*Marginal Propensity to Consume*), PDRB dan Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011 Provinsi Jawa Barat (Triliun Rp)



Jika ditelaah lebih mendalam, peranan konsumsi makanan masih lebih besar daripada konsumsi non makanan. Struktur konsumsi rumahtangga di Provinsi Jawa Barat menuju peralihan ke pola konsumsi modern, di mana konsumsi non makanan menjadi lebih besar daripada konsumsi makanan. Hal ini berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai beralih ke pemenuhan kebutuhan sekunder.

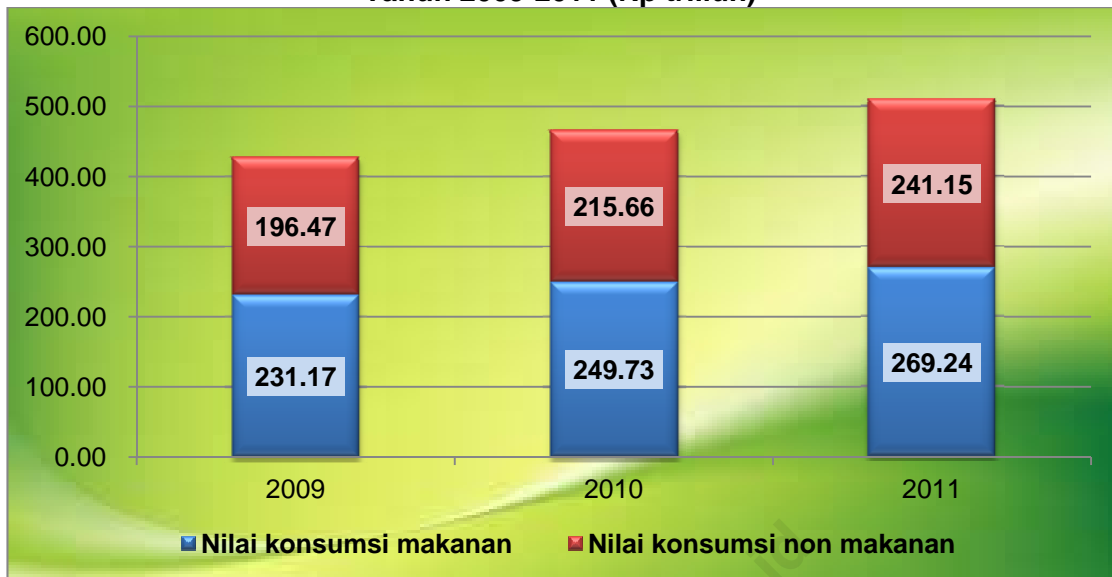
Pada tahun 2009 peranan konsumsi makanan sebesar 54,06 persen sedangkan peranan non makanan sebesar 45,94 persen. Peranan konsumsi makanan cenderung semakin menurun pada tahun 2010 sebesar 53,66 persen dan pada tahun 2011 sebesar 52,75 persen. Sebaliknya peranan non makanan mengalami kecenderungan yang meningkat, pada tahun 2010 sebesar 46,34 persen meningkat menjadi 47,25 persen pada tahun 2011. Gambaran tersebut diperlihatkan pada grafik berikut.

Grafik 3.
Peranan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Konsumsi
Rumahtangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011 (persen)



Secara nilai, baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan selama periode 2009-2010 terus meningkat. Pada tahun 2009, konsumsi makanan sebesar Rp.231,17 triliun meningkat menjadi Rp.249,73 triliun pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar Rp.269,24 triliun. Demikian halnya dengan konsumsi non makanan juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai konsumsi non makanan sebesar Rp.196,47 triliun, meningkat menjadi Rp.215,65 triliun pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 nilai konsumsi non makanan sebesar Rp.241,15 triliun.

Grafik 4.
Nilai Konsumsi Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2011 (Rp triliun)

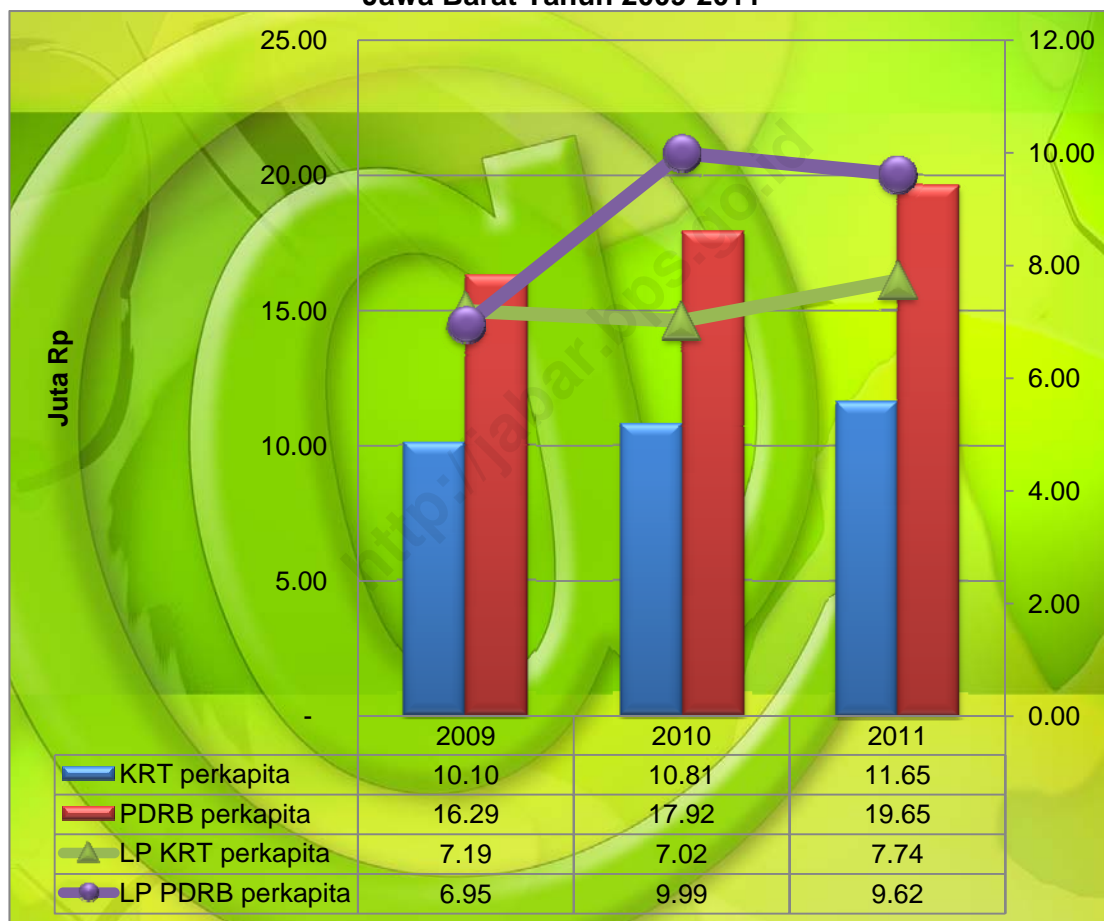


Grafik berikut menggambarkan perkembangan KRT perkapita dan PDRB perkapita selama periode tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 KRT perkapita sebesar Rp. 10,1 juta, meningkat menjadi Rp. 10,81 juta pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 11,65 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya PDRB perkapita, pada tahun 2009 PDRB perkapita sebesar Rp. 16,29 juta meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp. 17,92 juta dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 19,65 juta.

Perbandingan peningkatan KRT perkapita dan PDRB perkapita selama periode tahun 2009-2011, terlihat dari laju pertumbuhannya masing-masing. Pada tahun 2009 terlihat bahwa laju pertumbuhan KRT perkapita dan PDRB perkapita pada besaran yang hampir sama, yaitu 7,19 persen dan 6,95 persen. Terlihat pada grafik garis sebagai titik yang sama, kemudian pada tahun 2010 laju pertumbuhan KRT perkapita melembat sedangkan PDRB perkapita meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2009 perekonomian dunia mengalami krisis, dan berimbas kepada perekonomian Provinsi Jawa Barat sehingga pada tahun tersebut KRT yang

mendrive laju pertumbuhan ekonomi secara agregat. Memasuki tahun 2010, perekonomian dunia mulai membaik dan perekonomian Jawa Barat pun mulai bangkit kembali. Ditandai oleh meningkatnya investasi dan kinerja sektoral terutama sektor industri. Pada tahun 2011 PDRB perkapita mengalami perlambatan, laju pertumbuhannya sebesar 9,62 persen sedangkan KRT perkapita meningkat sebesar 7,74 persen.

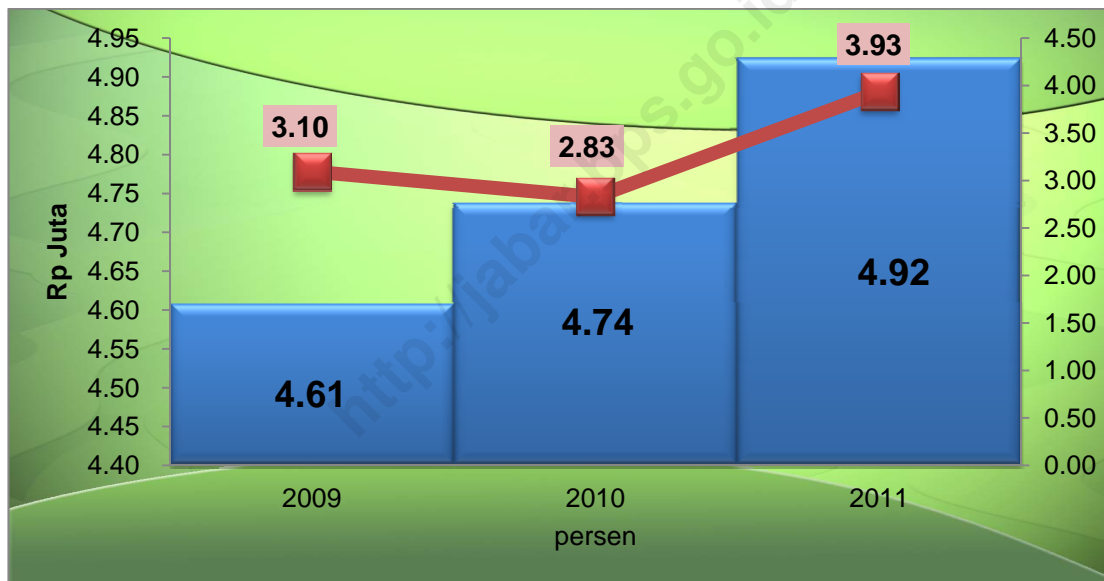
Grafik 5.
KRT perkapita dan LPE perkapita serta Laju Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011



Indikator riil meningkatnya KRT perkapita dengan menghilangkan faktor inflasi atau kenaikan harga adalah, KRT perkapita menurut harga konstan. Grafik berikut menggambarkan semakin meningkatnya KRT perkapita secara riil. Pada tahun 2009

sebesar Rp. 4,61 juta, meningkat menjadi Rp. 4,74 juta pada tahun 2010 dan kembali meningkat pada tahun 2011 yang sebesar Rp.4,93 juta. Laju pertumbuhannya pun mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2009 meningkat sebesar 3,1 persen, kemudian melambat menjadi sebesar 2,83 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 3,93 persen. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pola dan kualitas konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat tidak berubah secara signifikan selama periode tahun 2009-2011.

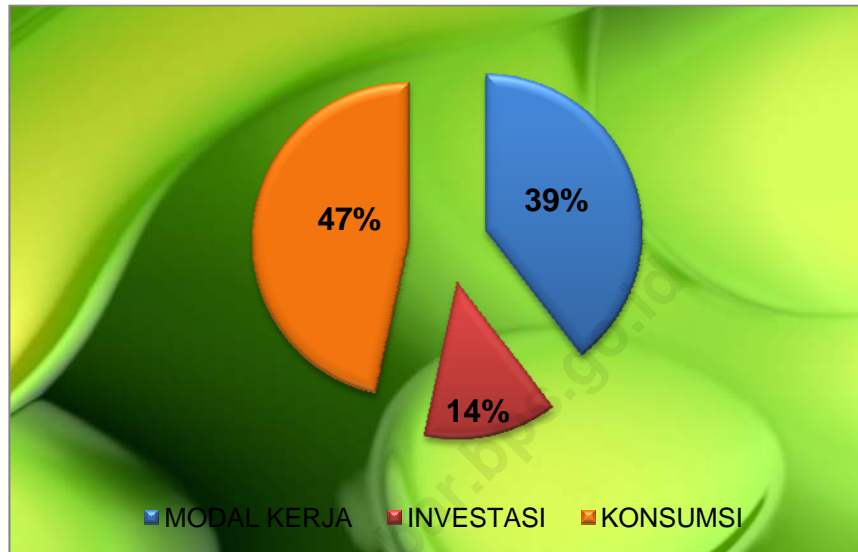
Grafik 6.
KRT perkapita atas dasar harga konstan (Rp Juta) dan laju pertumbuhannya (persen) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011



Salah satu penyebab meningkatnya konsumsi rumah tangga adalah kemudahan yang diberikan pihak perbankan dalam memberikan kredit untuk konsumsi. Sangat banyak penawaran menarik yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembiayaan konsumsinya, antara lain untuk kredit kendaraan bermotor, barang elektronik sampai dengan kartu kredit. Hal ini menjadi penyebab semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat oleh rumah tangga. Berikut

adalah grafik proporsi pinjaman yang diberikan Bank umum dan BPR menurut penggunaannya.

**Grafik 7 .
Proporsi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis
Penggunaan Tahun 2011 Di Provinsi Jawa Barat
(persen)**

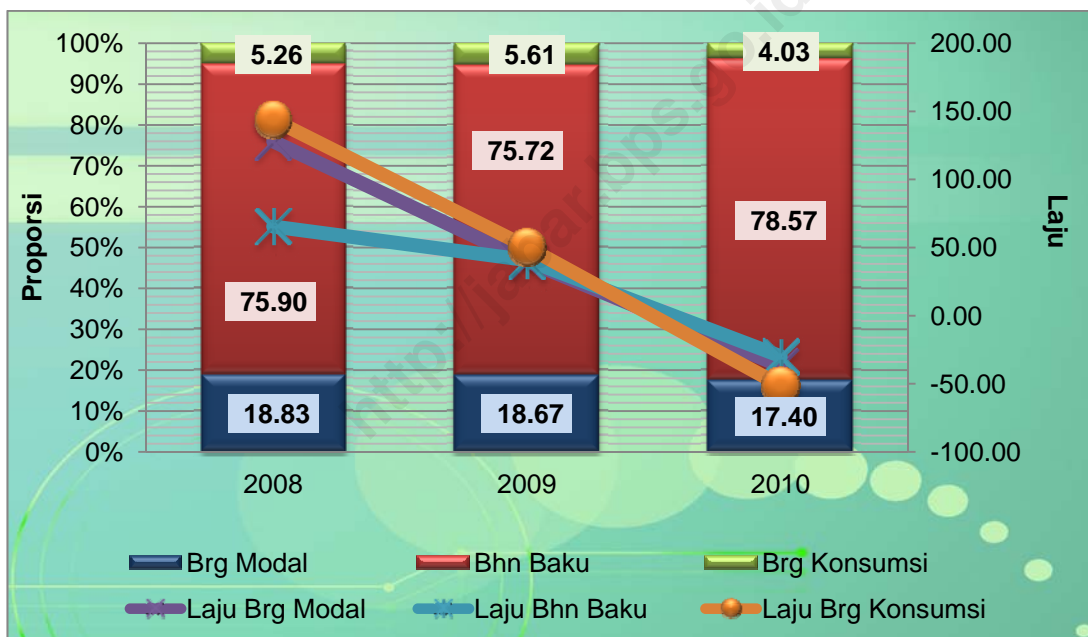


Sumber data : BI

Pada tahun 2011 proporsi pinjaman yang diberikan yang digunakan untuk konsumsi mencapai 47 persen, sedangkan untuk modal kerja sebesar 39 persen dan untuk investasi sebesar 14 persen. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat Jawa Barat masih mengandalkan pembiayaan dari perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Ada kecenderungan masyarakat mengikuti pola konsumsi yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya sehingga memilih untuk melakukan pinjaman untuk memenuhi pola konsumsinya. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor lingkungan yang menuntut penampilan seseorang harus sesuai dengan *trend* dan selalu *up to date*.

Tingkat konsumsi yang tinggi, yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang tinggi merupakan potensi pasar yang sangat baik bagi para produsen. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk lebih meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Idealnya secara ekonomi meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai sisi permintaan akan menyebabkan meningkatnya produksi atau sisi *supply*. Ini akan menjadi hal yang positif dengan catatan barang-barang yang dikonsumsi adalah barang produksi dalam *region*, bukan barang impor.

Grafik 8.
Proporsi Impor Komoditi Utama Menurut Klasifikasi BEC
Tahun 2009 – 2011 Di Provinsi Jawa Barat



Sumber data : BI

Grafik di atas menggambarkan data impor komoditi utama menurut klasifikasi kategori ekonomi (*BEC, Broad Economic Categories*). Impor barang konsumsi mempunyai proporsi yang paling sedikit jika dibandingkan dengan untuk bahan baku industri serta barang modal. Hanya sekitar 5,26 persen dari total impor luar negeri

pada tahun 2009 kemudian meningkat menjadi 5,61 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sedikit menurun persentasenya menjadi 4,03 persen. Jika melihat laju pertumbuhannya pada tahun 2009 meningkat sangat tinggi terutama untuk barang modal dan barang konsumsi. Pada tahun 2010 laju pertumbuhannya semakin melambat untuk ketiga kategori impor, dimana tidak lebih dari 50 persen, sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya menurun.

3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumahtangga (LNPRT)

Konsumsi lembaga non profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) memiliki besaran nilai yang tidak terlalu signifikan dalam perekonomian, akan tetapi perannya dalam mengawal kehidupan sosial dan politik masyarakat tidak dapat diabaikan. Bagi wilayah yang mengalami bencana alam LNPRT tampil sebagai garda terdepan, pada masa pemilu baik yang berskala regional maupun nasional LNPRT mengawal suksesnya pesta demokrasi. Nilai Konsumsi Lembaga Non Profit atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp 5,06 triliun, hal ini bertepatan dengan pesta demokrasi pemilihan umum dan pemilihan presiden. Pengeluaran partai politik dan seluruh lembaga yang terkait dengan peristiwa tersebut cukup tinggi. Pada tahun 2010 nilai konsumsi LNPRT sebesar Rp.3,38 triliun dan pada tahun 2011 hanya sedikit meningkat yaitu menjadi Rp.3,56 triliun.

Laju pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit pada tahun 2009 meningkat signifikan mencapai 67,19 persen, dan pada tahun 2010 menurun sebesar 33,96 persen. Penurunan yang terjadi pada tahun 2010 merupakan indikasi kembali normalnya pola konsumsi Lembaga Non Profit. Selanjutnya pada tahun 2011 konsumsi LNPRT meningkat sebesar 4,45 persen.

Grafik 9.
Nilai Konsumsi Lembaga Non Profit (Triliun Rp) dan Laju Pertumbuhan (persen)
Tahun 2009-2011 Di Provinsi Jawa Barat

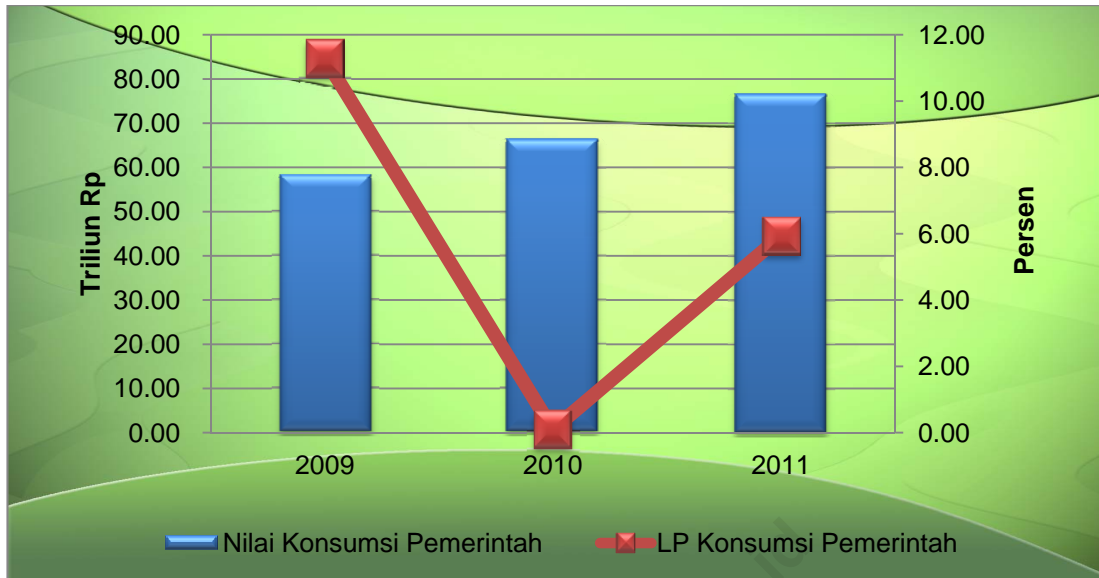


3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah selama periode tiga tahun terakhir 2009-2011 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebesar Rp 58,17 triliun menjadi Rp 66,52 triliun pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.76,55 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya belanja barang, belanja pegawai serta belanja modal.

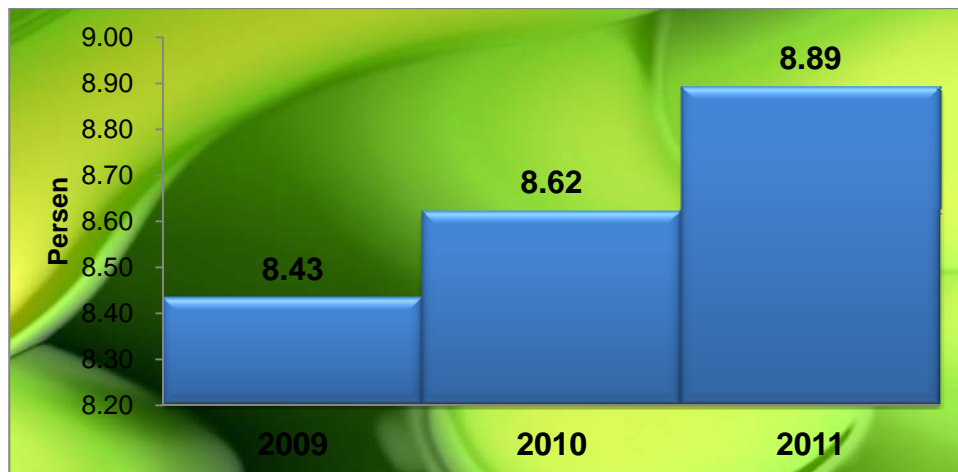
Laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah secara riil pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 11,29 persen, kemudian melambat sehingga hanya meningkat tipis pada tahun 2010 sebesar 0,10 persen. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,94 persen.

Grafik 10.
Nilai Konsumsi Pemerintah dan Laju Pertumbuhan
Tahun 2009 – 2011 Di Provinsi Jawa Barat



Peranan konsumsi pemerintah terus meningkat selama periode tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 peranannya sebesar 8,43 persen dan pada tahun 2010 peranannya meningkat menjadi 8,62 persen. Pada tahun 2011 peranan konsumsi pemerintah sebesar 8,89 persen.

Grafik 11.
Peranan Konsumsi Pemerintah
Tahun 2009 – 2011 Di Provinsi Jawa Barat



3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Salah satu komponen pengeluaran PDRB adalah Investasi. Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan pada masa-masa yang akan datang. Secara prinsip, investasi dibedakan menjadi investasi finansial dan investasi non-finansial.

Investasi finansial lebih merupakan investasi dalam bentuk kepemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan surat berharga, obligasi, dan sejenisnya. Sedangkan investasi non-finansial merupakan investasi yang direalisasikan dalam bentuk investasi fisik (investasi riil) yang berwujud kapital atau barang modal, termasuk di dalamnya inventori (persediaan). Meskipun demikian, investasi finansial pada suatu saat juga dapat direalisasikan sebagai investasi fisik.

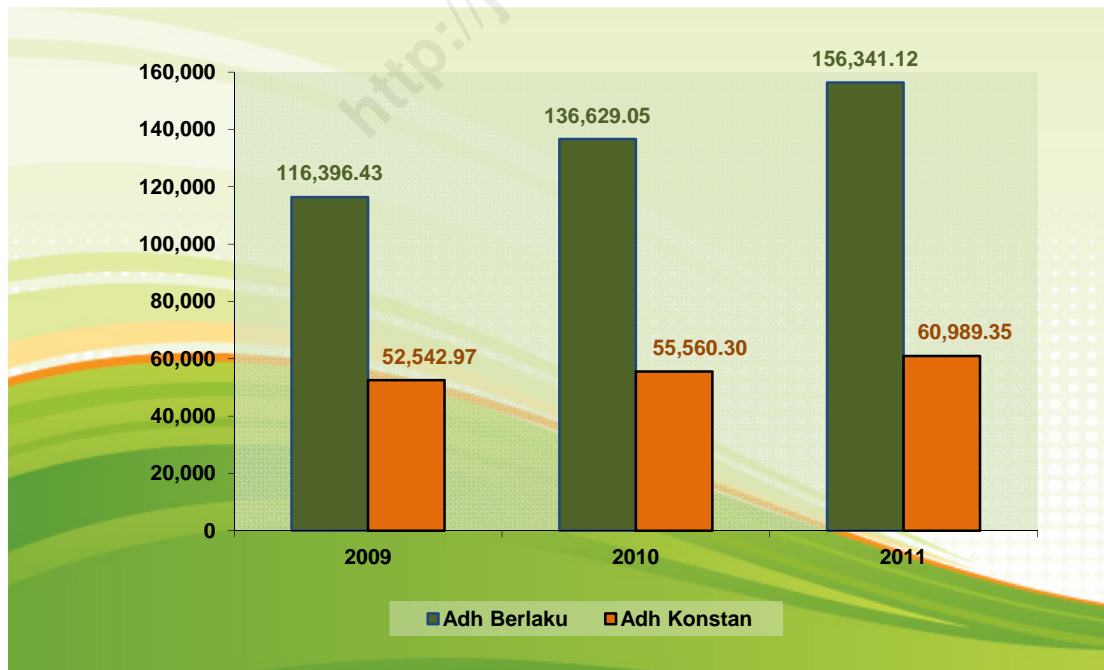
Kapital diartikan sebagai berbagai bentuk barang modal seperti bangunan, mesin dan perlengkapannya, sarana atau alat transportasi, serta barang modal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan suatu proses produksi. Pengertian lain dari kapital seperti yang dijelaskan dalam *System of National Accounts (SNA)* adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Menurut SNA, PMTB identik dengan besarnya investasi fisik (*real investment*) yang direalisasikan di suatu negara atau wilayah pada suatu waktu tertentu (*physical domestic investment*). PMTB disebut sebagai “bruto” karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya.

Van den Berg (2001) mengemukakan bahwa investasi fisik memiliki eksternalitas positif yaitu suatu aktifitas yang memberikan dampak positif terhadap aktifitas atau individu lainnya. Eksternalitas positif tersebut dapat membantu

perekonomian mengatasi *diminishing return* (suatu kondisi dimana setiap penambahan suatu input, dengan asumsi bahwa input yang lain adalah konstan, maka akan mengalami pertumbuhan output yang semakin menurun) dan *depreciation* (penyusutan).

Letak wilayah Jawa Barat yang merupakan daerah terdekat dengan Ibukota Jakarta memberikan suatu keuntungan tersendiri untuk menarik investor baik dari dalam negeri maupun manca negara. Demikian pula halnya dengan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan investasi. Salah satu prestasi yang mengesankan adalah ditetapkannya Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan beriklim investasi terbaik (*region champions*) pada tahun 2010. Prestasi tersebut tentunya mampu memperbesar peluang untuk meningkatkan investasi di Wilayah Jawa Barat pada tahun-tahun selanjutnya.

Grafik 12. PMTB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2009 – 2011 (milyar rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan dari Rp. 116.396,43 milyar rupiah pada tahun 2009, naik menjadi Rp. 136.629,05 milyar rupiah tahun 2010, dan kemudian meningkat secara signifikan menjadi Rp. 156.341,12 milyar rupiah pada tahun 2011. Demikian pula halnya apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), maka komponen PMTB terus mengalami peningkatan selama periode tiga tahun terakhir yaitu dari Rp. 52.542,97 milyar pada tahun 2009, Rp. 55.560,30 milyar tahun 2010, dan menjadi Rp. 60.989,35 milyar pada tahun 2011.

Apabila ditinjau dari sisi kontribusinya, maka komponen PMTB selama periode 2009-2011 mempunyai peranan yang semakin meningkat terhadap total PDRB, yaitu dari 16,87 persen pada tahun 2009, menjadi 17,71 persen tahun 2010, dan kemudian meningkat kembali menjadi 18,16 persen pada tahun 2011. Data tersebut menunjukkan bahwa komponen PMTB mempunyai peranan yang cukup besar dalam struktur perekonomian di Jawa Barat.

Tabel 2.
PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB terhadap Total PDRB
dan *Source of Growth* PMTB di Jawa Barat
Tahun 2009-2011

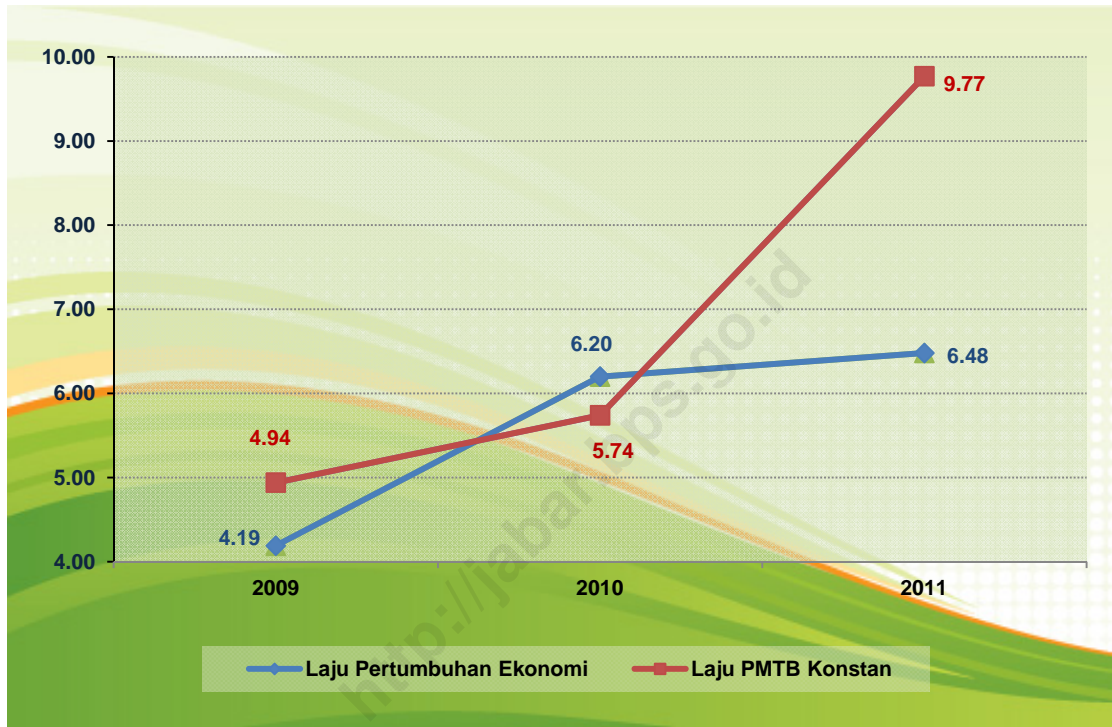
Uraian	Tahun		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDRB adh Berlaku (Milyar rupiah)	689.841,31	771.593,86	861.006,35
2. PMTB (Milyar rupiah)	116.396,43	136.629,05	156.341,12
Persentase PMTB terhadap total PDRB (persen)	16,87	17,71	18,16
<i>Source of Growth</i> PMTB	0,85	0,99	1,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Dari sisi laju pertumbuhannya, PMTB selama periode 2009-2011 terus mengalami peningkatan dari 4,94 persen pada tahun 2009, 5,74 persen tahun 2010,

dan meningkat menjadi sebesar 9,77 persen pada tahun 2011. Sementara itu apabila ditinjau dari sumber pertumbuhannya (*source of growth*), PMTB menyumbang laju pertumbuhan sebesar 0,85 persen (2009); 0,99 persen (2010); dan 1,68 persen (2011).

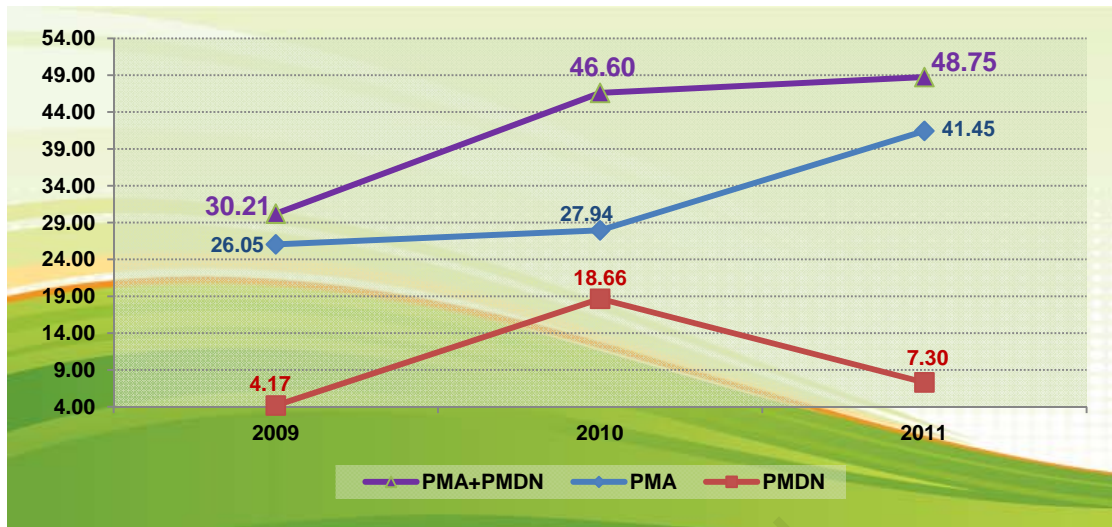
Grafik 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2011 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Secara umum, total nilai realisasi investasi swasta melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode Tahun 2009-2011 menunjukkan peningkatan. Nilai realisasi PMA meningkat dari Rp. 26,05 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp. 27,94 triliun pada tahun 2010 dan meningkat kembali menjadi Rp. 41,45 triliun pada tahun 2011. Sementara itu, PMDN berfluktuasi dari Rp. 4,17 triliun tahun 2009 menjadi Rp. 18,66 triliun tahun 2010, dan mengalami penurunan menjadi Rp. 7,31 triliun pada tahun 2011.

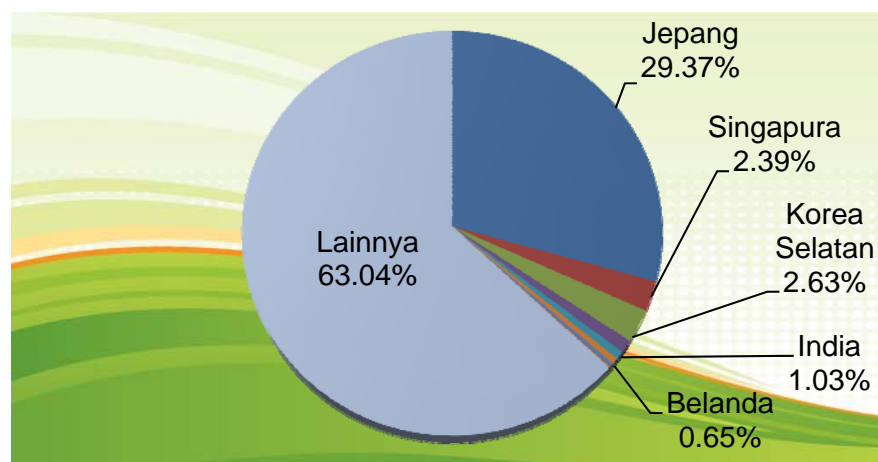
**Grafik 14. Nilai Realisasi PMA dan PMDN
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2011 (Triliun Rp)**



Sumber: BKPPMD Provinsi Jawa Barat

Apabila dilihat dari nilai investasinya, maka peringkat 5 (lima) besar PMA di Jawa Barat berasal dari negara Jepang di peringkat pertama dengan 29,37 persen. Disusul kemudian oleh Korea Selatan sebesar 2,63 persen; Singapura 2,39 persen; India 1,03 persen; dan Belanda 0,65 persen.

**Grafik 15. Persentase Nilai Investasi PMA di Jawa Barat
Menurut Negara Asal Tahun 2011**



Sumber: BKPPMD Provinsi Jawa Barat (diolah)

Perlu ditekankan bahwa PMTB tidak hanya mencakup investasi fisik (riil) institusi swasta, namun juga mencakup institusi rumahtangga dan pemerintah sehingga diperlukan kehati-hatian dalam membandingkan secara langsung antara PMTB dan investasi swasta PMA dan PMDN. Adapun kontribusi terbesar PMTB di Jawa Barat selama kurun waktu 2009-2011 masih didominasi oleh bangunan, disusul kemudian oleh mesin, transportasi, dan perlengkapan lainnya.

3.5. Inventori

Inventori merupakan salah satu pendukung utama dalam proses produksi. Tidak adanya kontrol terhadap inventori dapat menyebabkan berhentinya proses produksi. Di lain pihak semakin banyak penumpukan inventori akan mengakibatkan tingginya biaya inventori. Perubahan inventori dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan maupun penurunan dalam penggunaan bahan baku dan pelepasan barang-barang hasil produksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada dasarnya, fungsi inventori di bagi dalam dua bagian sebagai berikut :

- a. Inventori dalam bentuk bahan baku, bahan jadi, bahan setengah jadi serta bahan penolong. Inventori ini sangat diperlukan tujuannya adalah untuk mengamankan proses produksi selama jangka waktu tertentu.
- b. Inventori merupakan sisa produksi yang belum terjual. Dalam ekonomi makro, inventori ini mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan. Tetapi pada tataran ekonomi mikro, inventori ini diperlukan dan harus dijaga keberadaannya. Hal tersebut untuk menghindari kelangkaan barang yang akan berdampak pada kenaikan harga.

Tabel 3.
Laju Pertumbuhan dan Peranan Inventori Terhadap
PDRB Jawa Barat Tahun 2009-2011

Tahun	Laju Inventori	Peranan Inventori (%)
(1)	(2)	(3)
2009	40,84	3,72
2010	3,45	3,93
2011	16,60	4,57

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terjadi fluktuasi laju pertumbuhan inventori dengan peranan yang semakin meningkat selama kurun waktu 2009-2011. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan inventori adalah sebesar 40,84 persen, kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 3,45 persen tahun 2010. Namun pada tahun 2011, kembali mengalami peningkatan laju pertumbuhan yaitu sebesar 16,60 persen. Sementara itu apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB selama periode 2009-2011, rata-rata peranan inventori adalah antara 3-5 persen.

3.4. Ekspor dan Impor

Krisis global di Amerika Serikat dan Uni Eropa berpengaruh negatif terhadap penurunan kinerja perdagangan pada mitra dagang negara tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Fakta di atas menggambarkan bahwa transaksi perdagangan internasional rentan terhadap pengaruh regulasi, kebijakan dan stabilitas negara-negara yang terlibat. Tingkat perubahan pengaruh yang terjadi bersifat lebih dinamis karena harus mengakomodir beberapa kepentingan dari negara-negara yang terlibat. Transaksi perdagangan internasional baik bilateral dan multilateral ditandai dengan agenda perjanjian perdagangan untuk memenuhi beberapa ketentuan yang sifatnya

lebih detail dan kompleks bahkan terkadang kental dengan kepentingan ekonomi dan politik negara yang terlibat.

Sementara transaksi perdagangan domestik relatif lebih kecil tingkat kompleksitasnya sepanjang stabilitas politik, ekonomi dan sosial dalam negeri terkendali, gejala akan terjadi saat pemerintah memberlakukan *administered price* terhadap komoditas strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan Tarif Dasar Listrik.

Aktivitas ekspor Jawa Barat selama tiga tahun terakhir (2009-2011) memiliki *trend* yang fluktuatif. Tercatat laju ekspor pada tahun 2008 sebesar 4,75 persen kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun berikutnya seiring dengan pemulihan ekonomi global dengan laju sebesar 13,09 persen diakhiri dengan perlambatan sebesar 6,51 persen pada tahun 2011. Perlambatan yang terjadi pada Tahun 2009 dan 2011 disebabkan imbas negatif krisis financial yang melanda Amerika Serikat hingga meluas ke Uni Eropa. Sebaliknya dengan kinerja impor yang memperlihatkan *trend* yang semakin meningkat pada kurun waktu yang sama, dengan peningkatan sebesar 13,59 persen pada tahun 2011.

Tabel 4.
Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2009-2011

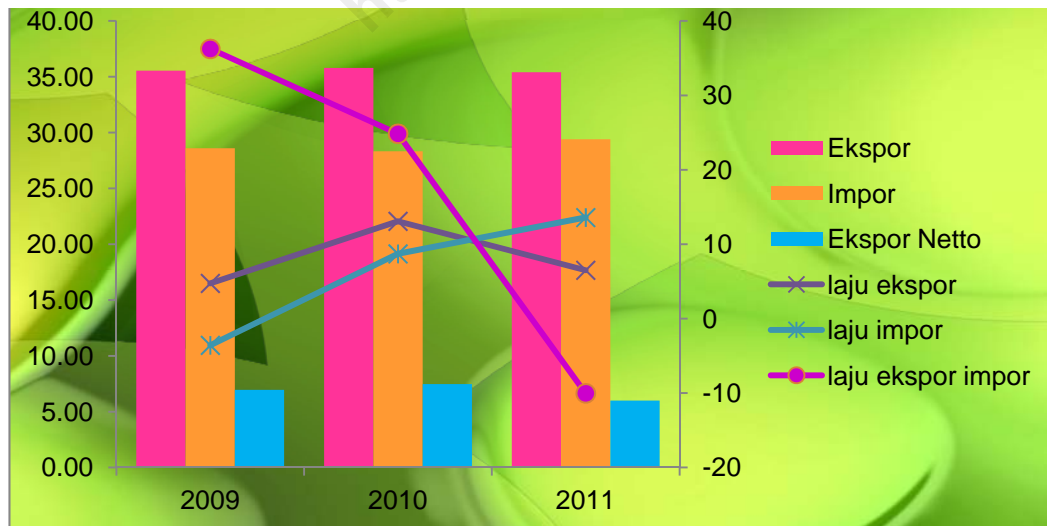
Komponen	Peranan (%)			Laju Pertumbuhan (%)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ekspor	35.55	35.79	35.40	4.75	13.09	6.51
Impor	28.60	28.33	29.40	-3.57	8.71	13.59
Ekspor Netto	6.95	7.47	6.00	36.25	24.85	-10.02

Sumber : BPS Jawa Barat, 2011

Meski kinerja impor Jawa Barat mengalami peningkatan dan kinerja ekspor melambat pada Tahun 2011 akan tetapi komponen ekspor masih memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan impornya atau disebut dengan ekspor netto. Pertumbuhan ekspor netto memperlihatkan *trend* yang menurun, dengan penurunan sebesar 10,02 persen pada tahun 2011 setelah melambat sebesar 24,85 persen pada tahun sebelumnya.

Kontribusi ekspor terhadap PDRB rata-rata lebih dari 35 persen dan *share* impor rata-rata lebih dari 28 persen selama tiga tahun terakhir (2009-2011). Tercatat nilai ekspor Jawa Barat pada Tahun 2011 telah mencapai Rp 304.822.407,07 Juta. Peranan ekspor yang besar dalam perekonomian Jawa Barat ini didominasi oleh ekspor antar negara dengan *share* sebesar 25,95 persen disusul dua komponen lainnya yaitu ekspor antar daerah dan eksor jasa masing-masing dengan *share* sebesar 7,64 persen dan 1,81 persen.

Grafik 16.
Laju Pertumbuhan dan Peranan Ekspor Impor Jawa Barat, Tahun 2009-2011 (Persen)

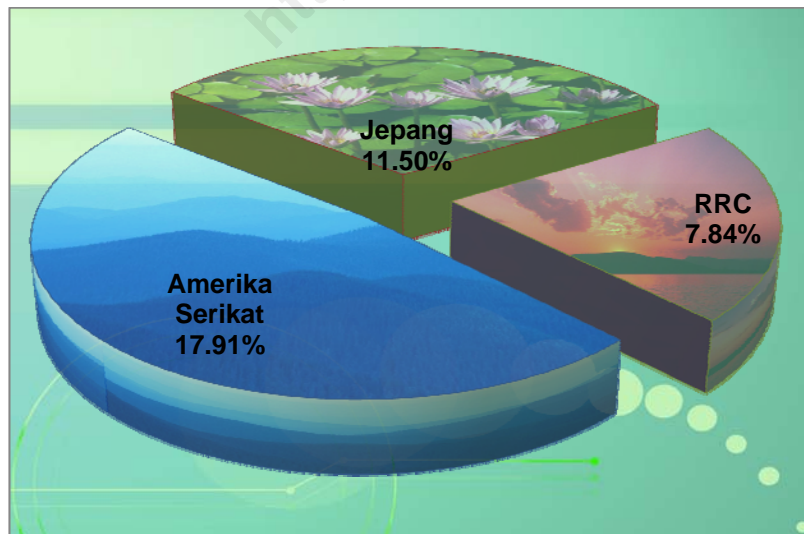


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Sementara impor Jawa Barat mengalami peningkatan pertumbuhan dan *share* dan pada tahun 2011. Penyebab impor meningkat karena *domestic demand* yang tinggi, dimana produsen dalam proses produksinya menggunakan material dengan konten impor yang tinggi sehingga berakibat *share* impor meningkat pada tahun 2011. Hal ini dapat diamati dari komposisi impor Jawa Barat didominasi oleh impor bahan baku sebesar 81,04 persen, disusul oleh impor barang modal 18,52 persen dan terakhir konsumsi rumah tangga sebesar 3.64 persen.

Perdagangan internasional Jawa Barat mengalami pemulihan pada Tahun 2010, hal ini dapat diamati pada Grafik dengan peningkatan sebesar 13,09 persen. Seperti telah disinggung pada awal bahasan bahwa krisis financial global yang melanda Uni Eropa dan Amerika Serikat sepanjang Tahun 2011 mengakibatkan perlambatan terhadap kinerja ekspor pada Tahun 2011 sebesar 6,51 persen.

Grafik 17.
Kontribusi Tiga Negara Tujuan Ekspor Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
(Persen)



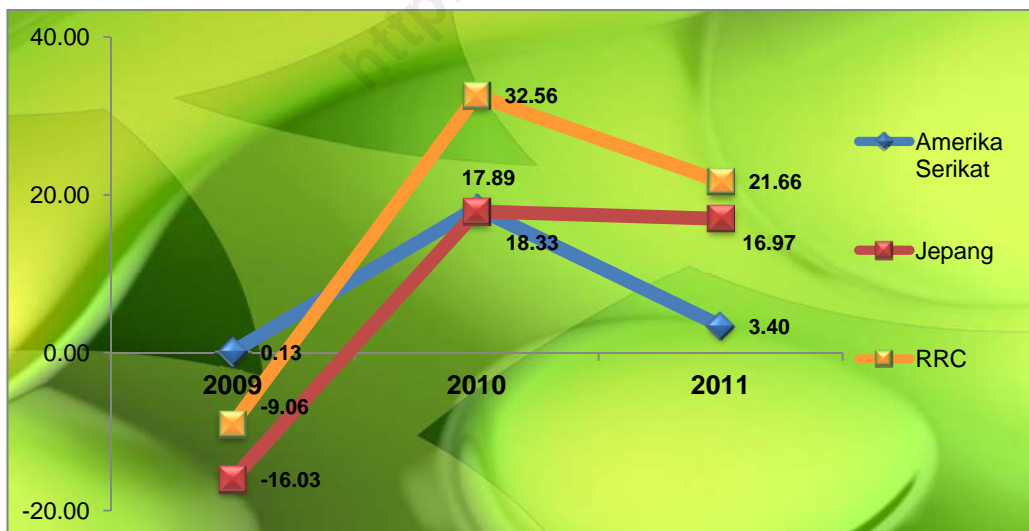
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2011

Tiga negara tujuan utama ekspor Jawa Barat menurut *share* terbesar terhadap nilai ekspor Jawa Barat adalah Amerika Serikat (17,91 persen), Jepang (11,50 persen) dan RRC (7,84 persen). Dari sisi pertumbuhan ekspor di tiga negara, perlambatan laju ekspor terjadi di tiga negara tujuan ekspor yang terbesar terjadi di Amerika Serikat sebesar 3,40 persen, disusul oleh Jepang sebesar 16,97 persen dan RRC sebesar 21,66 persen

Fakta di atas juga dapat menjelaskan penurunan ekspor netto sebesar 10,02 persen yaitu dengan melemahnya aktivitas ekspor ke tiga negara tujuan utama akibat menurunnya *demand* terhadap komoditas ekspor Jawa Barat, dengan kata lain meski terjadi penurunan ekspor netto tetapi nilai ekspor Jawa Barat masih lebih tinggi dari nilai impornya namun mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun 2010.

Grafik 18.

Pertumbuhan Ekspor Non Migas Jawa Barat pada Tiga Besar Negara Tujuan Tahun 2009-2011 (Persen)

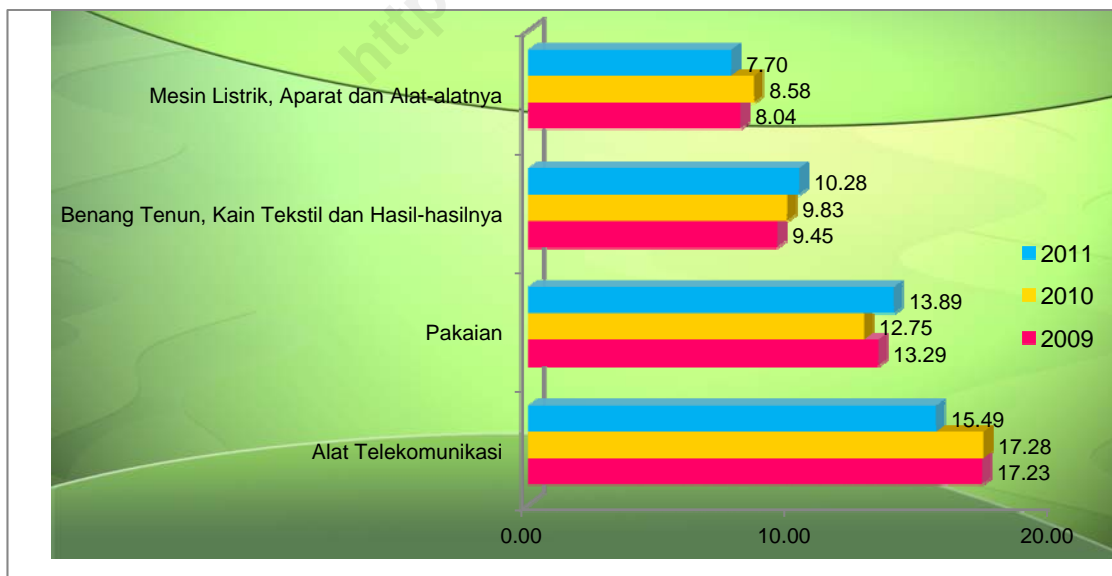


Sumber : Bank Indonesia, diolah

Empat komoditas unggulan ekspor Jawa Barat berdasarkan *share*-nya terhadap nilai ekspor selama kurun tiga tahun terakhir (2009-2011) adalah (1) alat telekomunikasi, (2) pakaian, (3) benang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya dan (4) mesin listrik, aparat dan alat-alatnya.

Apabila dicermati dari grafik diatas terlihat bahwa pada Tahun 2011 *share* komoditas (1) pakaian dan (2) benang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya mengalami kenaikan meski faktanya terjadi penurunan *demand* dari negara tujuan utama ekspor Jawa Barat. Hal ini memungkinkan karena adanya upaya diversifikasi negara tujuan ekspor Jawa Barat sehingga nilai ekspor komoditas tertentu mengalami peningkatan. Sementara dua komoditas utama lainnya mengalami penurunan *share* yaitu (1) alat telekomunikasi dan (2) mesin listrik, aparat dan alat-alatnya karena merupakan komoditas-komoditas ekspor dengan tujuan utama negara-negara yang mengalami krisis finansial.

Grafik 19.
Peranan Empat Komoditas Unggulan Ekspor Non Migas Jawa Barat Tahun 2009-2011 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

3.7. Sumber Laju Pertumbuhan (*Source of Growth/SOG*)

Sumber laju pertumbuhan (SOG) menggambarkan sumbangan masing-masing komponen PDRB terhadap total laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Pada tahun 2011 seluruh komponen memiliki peranan positif bagi LPE total yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), inventori, ekspor dan impor.

Konsumsi rumah tangga dalam kurun tiga tahun terakhir (2009-2011) memberikan andil positif dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sejalan dengan *share* komponen ini yang memiliki porsi terbesar dalam PDRB. Sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sempat mengalami penurunan, meski demikian kembali meningkat di Tahun 2011 pada posisi 3,67 persen.

Andil konsumsi lembaga non profit selama tiga tahun (2008-2010) menunjukkan *trend* yang berfluktuasi, tercatat pada tahun 2009 komponen ini memberikan andil positif dengan besaran 0,38 persen. Andil yang cukup besar ini disebabkan oleh adanya kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2009, dimana belanja organisasi partai politik meningkat. Pada Tahun 2010 komponen ini memberikan andil negative sebesar 0,30 persen kemudian menyumbang andil positif meski tipis pada Tahun 2011 yaitu sebesar 0,02 persen.

Selama tiga tahun (2009-2011), andil konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan nilai positif. Pada tahun 2009, komponen ini memberikan andil positif sebesar 0,65 persen yang merupakan andil terbesar selama tiga tahun terakhir, tetapi kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 0,01 persen. Andil komponen ini pada tahun 2011 kembali meningkat sebesar 0,34 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Tabel 5.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011

Uraian	2009*)	2010**)	2011***)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.19	2.93	3.67
2. Konsumsi Lembaga	0.38	-0.30	0.02
3. Konsumsi Pemerintah	0.65	0.01	0.34
4. PMTB	0.85	0.99	1.68
5. Perubahan Stok	1.05	0.12	0.56
6. Ekspor	1.99	5.50	2.92
7. Impor	-1.18	2.67	4.26
Jumlah	4.19	6.20	6.48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

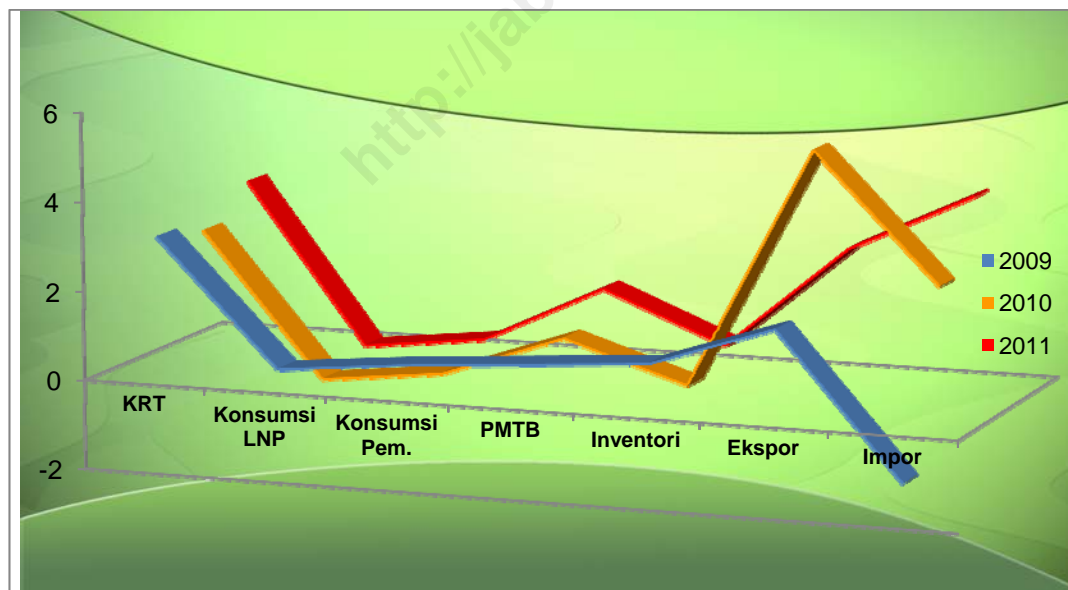
Sumbangan komponen PMTB terhadap laju pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun (2009-2011) menunjukkan *trend* yang semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan perkembangan yang positif bagi perekonomian Jawa Barat dimana menunjukkan peranan investasi fisik yang semakin besar dalam perekonomian di Jawa Barat untuk menggerakkan sektor riil. Tercatat pada tahun 2011 komponen ini memberikan andil sebesar 1,68 persen, atau merupakan andil kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, komponen inventori memberikan andil positif selama kurun tiga tahun, tercatat pada tahun 2009 sebesar 1,05 persen, kemudian menurun pada tahun 2010 sebesar 0,12 persen dan meningkat kembali menjadi 0,56 persen pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun tiga tahun terakhir (2009-2011) keberlangsungan proses produksi di Jawa Barat terjamin karena adanya komponen inventori yang menyumbangkan andil positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Komponen ekspor meliputi barang dan jasa selama tiga tahun terakhir mengalami andil positif, andil tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 5,50 persen saat terjadi pemulihan krisis global. Andil ekspor menurun menjadi sebesar 2,92 persen pada tahun 2011 seiring melemahnya demand dari negara tujuan ekspor yang mengalami krisis finansial.

Selama tiga tahun terakhir andil impor memperlihatkan *trend* yang meningkat, pada tahun 2009 andil negatif terjadi sebesar 1,18 karena komponen impor merupakan faktor pengurang ekonomi, maka andil negatif berarti mendukung LPE total. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011 berturut-turut impor memberikan andil positif masing-masing sebesar 2,67 persen dan 4,26 persen.

Grafik 20.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

3.8. Kesimpulan

Pada tahun 2011 perekonomian di Jawa Barat dimana tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat telah mencapai nilai Rp 861.006.347,80 juta dengan kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48 persen, dengan *trend* laju pertumbuhan yang meningkat selama tiga tahun terakhir (2009-2011), tercatat pada tahun 2009 sebesar 4,19 persen kemudian pada tahun berikutnya meningkat sebesar 6,20 persen karena terdapat pemulihan ekonomi akibat krisis global.

Selama kurun tiga tahun (2009-2011), pola pengeluaran di Jawa Barat masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dengan *trend* yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2011 sebesar 59,28 persen, dengan rata-rata share selama 2009-2011 sebesar 60,52 persen. Nilai konsumsi dari tahun 2009 sampai dengan 2011 selalu mengalami kenaikan yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan harga barang dan jasa, dan besaran kuantitas konsumsi yaitu Rp. 427,64 triliun pada tahun 2009, Rp. 465,38 triliun pada tahun 2010 dan tercatat sebesar Rp. 510,38 triliun pada tahun 2011.

Nilai konsumsi Lembaga non profit yang melayani rumahtangga (LNPR) relatif sangat kecil dibandingkan dengan komponen lainnya, pada tahun 2009 sebesar Rp. 5,05 triliun bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi nasional yaitu pemilihan umum dan pemilihan presiden. Pada tahun 2011 kembali pada posisi normal sebesar Rp. 3,556 triliun. Jika diamati laju pertumbuhannya sangat fluktuatif, pada tahun 2009 meningkat tajam sebesar 67,19 persen, pada tahun 2010 menurun 33,96 persen dan pada tahun 2011 meningkat tipis sebesar 4,45 persen.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam kurun 2009-2011 memiliki kontribusi di atas 8 persen terhadap PDRB. Sementara laju pertumbuhannya mengalami perlambatan di tahun 2010 sebesar 0,10 persen dan meningkat pada tahun 2011 sebesar 5,94 persen. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya serap anggaran pemerintah untuk program pembangunan daerah.

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan dari Rp. 116.396,43 milyar rupiah pada tahun 2009, naik menjadi Rp. 136.629,05 milyar rupiah tahun 2010, dan kemudian meningkat secara signifikan menjadi Rp. 156.341,12 milyar rupiah pada tahun 2011. Sementara itu apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), maka komponen PMTB terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan selama periode tiga tahun terakhir yaitu dengan peningkatan terbesar pada tahun 2011 sebesar 9,77. Proporsi terbesar PMTB di Jawa Barat selama kurun waktu 2009-2011 masih didominasi oleh bangunan dengan kontribusi di atas 55 persen dari total PMTB, disusul kemudian mesin, transportasi, dan perlengkapan lainnya.

Terjadi peningkatan laju pertumbuhan inventori selama tahun 2009 namun kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2010. Pada posisi tahun 2009, laju inventori adalah sebesar 40,84 dan melambat menjadi hanya sebesar 3,45 persen pada tahun 2010 dan kembali meningkat pada tahun 2011 sebesar 16,60 persen. Sementara itu apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB selama periode 2009-2011, rata-rata peranan inventori adalah sebesar 4,07 persen.

Ekspor impor Jawa Barat terbagi menjadi ekspor impor barang antar negara, ekspor impor barang antar daerah dan ekspor impor jasa. Secara total pada kurun waktu 2009-2010 Jawa Barat mengalami net ekspor yang positif atau dengan kata lain ekspor dari Jawa Barat melebihi impornya, meski terdapat perlambatan di tahun

2010 sebesar 24,85 persen. Di tahun 2011 Jawa Barat laju net ekspor menurun 10,02 persen sebagai akibat melemahnya demand dari negara tujuan ekspor Jawa Barat sementara nilai ekspornya masih melebihi nilai impor selama periode tersebut.

<http://jabar.bps.go.id>

Lampiran 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011
(Juta Rupiah)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	427,641,859.65	465,383,669.48	510,388,750.29
a. Makanan	231,172,548.62	249,728,584.80	269,239,832.25
b. Bukan Makanan	196,469,311.04	215,655,084.68	241,148,918.04
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	5,055,740.39	3,385,128.51	3,556,229.43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	58,172,553.50	66,516,281.58	76,546,315.82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	116,396,431.43	136,629,046.85	156,341,119.23
5. Inventori	25,692,478.21	30,343,120.03	39,312,654.51
Diskrepansi	8,929,474.51	11,734,473.33	23,173,388.00
6. Ekspor :	245,218,479.81	276,178,265.11	304,822,407.07
a. Antar Negara	188,561,917.50	213,667,333.71	223,435,333.59
b. Antar Provinsi	42,394,446.32	47,697,569.45	65,766,575.76
c. Jasa	14,262,115.98	14,813,361.95	15,620,497.72
7. Impor :	197,265,703.16	218,576,124.42	253,134,516.53
a. Antar Negara	82,054,713.52	100,648,080.56	135,589,487.16
b. Antar Provinsi	90,411,083.50	90,642,185.57	87,917,885.80
c. Jasa	24,799,906.14	27,285,858.29	29,627,143.57
P D R B	689,841,314.34	771,593,860.47	861,006,347.80

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011
(Juta Rupiah)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	195,064,726.14	203,968,382.74	215,796,706.66
a. Makanan	107,474,795.82	111,840,301.09	117,935,797.66
b. Bukan Makanan	87,589,930.33	92,128,081.65	97,860,908.99
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	2,719,519.33	1,796,077.43	1,876,056.60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,703,600.03	18,721,404.54	19,832,697.90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	52,542,970.59	55,560,297.78	60,989,348.25
5. Inventori	10,496,654.99	10,858,526.86	12,661,417.60
Diskrepansi	(10,770,851.41)	(11,939,536.34)	(6,970,062.08)
6. Ekspor :	127,577,573.34	144,277,884.54	153,676,293.07
a. Antar Negara	106,110,106.33	120,317,298.68	123,321,141.42
b. Antar Provinsi	14,922,382.92	17,997,258.04	24,600,023.45
c. Jasa	6,545,084.09	5,963,327.82	5,755,128.20
7. Impor :	92,928,942.51	101,019,220.76	114,751,214.82
a. Antar Negara	37,916,151.51	45,778,037.74	61,521,464.30
b. Antar Provinsi	43,338,230.29	42,520,359.48	39,938,069.31
c. Jasa	11,674,560.71	12,720,823.54	13,291,681.21
P D R B	303,405,250.50	322,223,816.79	343,111,243.18

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 3.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011
(Persen)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61.99	60.31	59.28
a. Makanan	33.51	32.37	31.27
b. Bukan Makanan	28.48	27.95	28.01
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.73	0.44	0.41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.43	8.62	8.89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.87	17.71	18.16
5. Inventori	3.72	3.93	4.57
Diskrepansi	1.29	1.52	2.69
6. Ekspor :	35.55	35.79	35.40
a. Antar Negara	27.33	27.69	25.95
b. Antar Provinsi	6.15	6.18	7.64
c. Jasa	2.07	1.92	1.81
7. Impor :	28.60	28.33	29.40
a. Antar Negara	11.89	13.04	15.75
b. Antar Provinsi	13.11	11.75	10.21
c. Jasa	3.60	3.54	3.44
P D R B	100.00	100.00	100.00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 4.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011
(Persen)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.29	63.30	62.89
a. Makanan	35.42	34.71	34.37
b. Bukan Makanan	28.87	28.59	28.52
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.90	0.56	0.55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.16	5.81	5.78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.32	17.24	17.78
5. Inventori	3.46	3.37	3.69
Diskrepansi	(3.55)	(3.71)	(2.03)
6. Ekspor :	42.05	44.78	44.79
a. Antar Negara	34.97	37.34	35.94
b. Antar Provinsi	4.92	5.59	7.17
c. Jasa	2.16	1.85	1.68
7. Impor :	30.63	31.35	33.44
a. Antar Negara	12.50	14.21	17.93
b. Antar Provinsi	14.28	13.20	11.64
c. Jasa	3.85	3.95	3.87
P D R B	100.00	100.00	100.00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 5.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 2009-2011 (Persen)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.18	8.83	9.67
a. Makanan	8.24	8.03	7.81
b. Bukan Makanan	10.31	9.77	11.82
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	74.84	(33.04)	5.05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25.14	14.34	15.08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.70	17.38	14.43
5. Inventori	26.19	18.10	29.56
Diskrepansi	(68.54)	31.41	97.48
6. Ekspor :	(4.89)	12.63	10.37
a. Antar Negara	1.03	13.31	4.57
b. Antar Provinsi	(24.84)	12.51	37.88
c. Jasa	(3.45)	3.87	5.45
7. Impor :	(10.51)	10.80	15.81
a. Antar Negara	(28.78)	22.66	34.72
b. Antar Provinsi	10.56	0.26	(3.01)
c. Jasa	5.71	10.02	8.58
P D R B	8.93	11.85	11.59

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 6.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.01	4.56	5.80
a. Makanan	4.27	4.06	5.45
b. Bukan Makanan	5.92	5.18	6.22
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	67.19	(33.96)	4.45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.29	0.10	5.94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.94	5.74	9.77
5. Inventori	40.84	3.45	16.60
Diskrepansi	(365.86)	10.85	(41.62)
6. Ekspor :	4.75	13.09	6.51
a. Antar Negara	20.88	13.39	2.50
b. Antar Provinsi	(43.06)	20.61	36.69
c. Jasa	(16.19)	(8.89)	(3.49)
7. Impor :	(3.57)	9.24	13.59
a. Antar Negara	(21.53)	22.06	34.39
b. Antar Provinsi	21.06	(1.89)	(6.07)
c. Jasa	(4.69)	8.96	4.49
P D R B	4.19	6.20	6.48

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 7.
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Tahun 2000 = 100,00)
(Persen)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	219.23	228.16	236.51
a. Makanan	215.09	223.29	228.29
b. Bukan Makanan	224.31	234.08	246.42
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	185.91	188.47	189.56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	311.02	355.30	385.96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	221.53	245.91	256.34
5. Inventori	244.77	279.44	310.49
Diskrepansi	(82.90)	(98.28)	(332.47)
6. Ekspor :	192.21	191.42	198.35
a. Antar Negara	177.70	177.59	181.18
b. Antar Provinsi	284.10	265.03	267.34
c. Jasa	217.91	248.41	271.42
7. Impor :	212.28	216.37	220.59
a. Antar Negara	216.41	219.86	220.39
b. Antar Provinsi	208.62	213.17	220.14
c. Jasa	212.43	214.50	222.90
P D R B	227.37	239.46	250.94

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 8.
Inflasi Tahun 2009-2011
(Persen)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.98	4.08	3.66
a. Makanan	3.81	3.81	2.24
b. Bukan Makanan	4.14	4.36	5.27
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	4.58	1.38	0.58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.44	14.23	8.63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.54	11.01	4.24
5. Inventori	(10.40)	14.17	11.11
Diskrepansi	(111.83)	18.55	238.28
6. Ekspor :	(9.20)	(0.41)	3.62
a. Antar Negara	(16.42)	(0.07)	2.02
b. Antar Provinsi	31.99	(6.71)	0.87
c. Jasa	15.20	14.00	9.26
7. Impor :	(7.20)	1.93	1.95
a. Antar Negara	(9.24)	1.59	0.24
b. Antar Provinsi	(8.67)	2.18	3.27
c. Jasa	10.91	0.97	3.92
P D R B	4.55	5.32	4.79

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 9.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011 (jutaan rupiah)

Uraian	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.19	2.93	3.67
a. Makanan	1.51	1.44	1.89
b. Bukan Makanan	1.68	1.50	1.78
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.38	(0.30)	0.02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.65	0.01	0.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.85	0.99	1.68
5. Inventori	1.05	0.12	0.56
Diskrepansi	(5.09)	(0.39)	1.54
6. Ekspor :	1.99	5.50	2.92
a. Antar Negara	6.29	4.68	0.93
b. Antar Provinsi	(3.87)	1.01	2.05
c. Jasa	(0.43)	(0.19)	(0.06)
7. Impor :	(1.18)	2.67	4.26
a. Antar Negara	(3.57)	2.59	4.89
b. Antar Provinsi	2.59	(0.27)	(0.80)
c. Jasa	(0.20)	0.34	0.18
P D R B	4.19	6.20	6.48

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

<http://jabar.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Jl. P.H. Hasan Mustafa No. 43 Telp. (022) 7272595 - 7201696

Faks. (022) 7213572 Bandung 40124. E-mail: bps3200@mailhost.bps.go.id

Home Page <http://jabar.bps.go.id>